

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

NU dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ibarat dua sisi yang berbeda dari satu keping uang yang sama. NU lahir karena didorong semangat kebangsaan yang tinggi. Yakni didorong oleh kepeduliannya untuk mempertahankan Islam yang ramah pada nilai budaya setempat, serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan, yang merupakan warisan turun-temurun dalam Tradisi Nusantara.<sup>1</sup> Semangat kebangsaan NU ini, didasarkan pada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan prinsip-prinsip aswaja sebagai metode berfikir yang meliputi konsep tawasuth, tasamuh, i'tidal dan tawazun. Dari sinilah sikap kebangsaan dan dakwah NU diturunkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara.

Prinsip berbangsa, beragama dan bernegara NU seperti di atas, dibuktikan pertama kali oleh kalangan kiai pesantren ketika kehidupan beragama yang harmonis di Tanah Air kemudian diganggu oleh kelompok-kelompok keagamaan yang puritan sejak awal abad 20 di satu sisi, dan di sisi lain mekkah akan dikuasai kelompok aliran wahabi pada tahun 1920-an, dan hal ini dianggap akan mengancam kerukunan umat Islam sedunia. Akhirnya kalangan pesantren melakukan pembelaan dengan membentuk Komite Hijaz. Komite itulah yang merupakan embrio lahirnya NU pada tahun 1926.

Selanjutnya pada masa kolonial, pengharaman memakai celana panjang dan atribut kolonial lain oleh Kh. Hasyim, merupakan refleksi dari semangat resistensi total terhadap kolonial belanda. Selain dari itu, pada detik-detik kemerdekaan, dukungan dari tokoh NU yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 389.

menjadi wakil NU pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yaitu Wahid Hasyim, untuk tidak mencantumkan Piagam Jakarta di dalam dasar Negara adalah bukti nyata kontribusi elite NU pada Negara.<sup>2</sup> Bahkan paska kemerdekaan, NU kembali berperan dengan mengeluarkan Fatwa resolusi jihad 10 November 1945 sebagai seruan bagi warga Nahdliyin, untuk mengangkat senjata mengusir penjajah yang hendak merongrong kembali kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kemudian Pada masa Orde baru, dalam mukhtamar Situbondo 1984, NU memutuskan untuk menerima pancasila sebagai ideolog negara. Karena bagi NU, penerimaan dan pengamalan pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya. Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang dijiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan keislaman.

Sementara disisi lain, PKB lahir pada masa transisi rezim otoriter menuju masa reformasi. Pada masa transisi ini, banyak bermunculan partai baru yang lahir dari aspirasi warga NU. Dari empat partai yang sama-sama dilahirkan oleh warga NU; PNU, Partai SUNNI, PKU dan PNU, hanya PKB yang kelahirannya difasilitasi dan dideklarasikan serta didukung sepenuhnya oleh PBNU.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya PKB, NU tidak dapat dipisahkan dari PKB.

Disamping itu, di era reformasi ini, NU dan PKB-nya tampil ke depan membela komunitas-komunitas agama yang tertindas, seperti membela kehadiran Darul Arqam, komunitas Syiah, dan Ahmadiyah di Indonesia, dan menjadi kekuatan pembendung terhadap arus

---

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama Perspektif Hermeneutika Gadamer*, (Jakarta: LP3ES, 2014), h. 3.

<sup>3</sup> Syaiful Huda Syafi'iy, *Membuka Jalan Menuju Konsolidasi Politik*, (Bandung: Pustaka Politik Incres), h. 76.

sektarianisme dan fundamentalisme agama yang membenarkan kekerasan dan sekian aksi terorisme di Tanah Air.<sup>4</sup>

Hal di atas dilakukan oleh PKB karena misi utama PKB sebagaimana yang tertuang dalam Mabda Syisasi adalah menciptakan tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal).

Dengan demikian, NU dengan PKB sejatinya saling melengkapi dalam mewujudkan Masalahah-Al Ummah. PKB mewujudkan Masalahah-Al Ummah dengan merumuskan kebijakan pemerintah terutama dalam pembuatan undang-undang. Sedangkan NU mewujudkan Masalahah-Al Ummah melalui gerakan social-kemasyarakatan dan kebudayaan.

Penduduk Jawa Barat secara letak geografis daerah bisa diklasifikasikan menjadi empat daerah, yaitu priangan timur yang meliputi; Kabupaten Bandung, Kabupaten garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kuningan. Daerah Priangan Barat meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Daerah Pantura atau Karesidenan Cirebon yang meliputi; Kabupaten Bekasi,

---

<sup>4</sup> Ahmad Baso, *Op. cit.*, h. 389.

Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Daerah metropolis-kota yang meliputi; Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Dan keempat klasifikasi daerah di Jawa Barat tersebut, secara mayoritas beragama Islam yang berkultur Nahdhiyin.

Jika dikaitkan dengan Pemilu Legislatif, seharusnya mayoritas warga Jawa Barat yang beragama Islam dan berkultur Nahdhiyin menjadi basis konstituen PKB yang pertama dan utama. Dan Nahdhiyin Jawa Barat seharusnya menjadikan PKB sebagai satu-satunya rumah politik bagi mereka. Karena NU dengan PKB merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dan hal ini pun seharusnya tercermin dengan lebih banyaknya kader-kader PKB Jawa Barat sebagai anggota dewan daripada partai politik yang lain. Akan tetapi fakta dilapangan berkata lain, basis-basis Nahdhiyin justeru dikuasai oleh partai politik yang notabenenya adalah nasionalis. Bahkan suara PKB di daerah-daerah tertentu yang merupakan basis Nahdhiyin didominasi oleh partai politik Islam lain.

Fakta ontologis bahwa basis Nahdhiyin Jawa Barat terpolarisasi ke berbagai partai politik lain membawa konsekuensi epistemologis. Fakta ini merupakan kerangka acuan bagi LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) sebagai Organ internal DPW PKB Jawa Barat yang menangani praksis-operasional dalam pemilu, agar dapat menjadikan PKB sebagai rumah politik Nahdhiyin. Dan yang dibutuhkan kemudian adalah kemampuan LPP dalam mengelola dan mengembangkan potensi politik Nahdhiyin sehingga bisa bertransformasi menjadi basis konstituen permanen PKB. Dan kemampuan kerja-kerja politik seperti ini, membutuhkan sistem pengorganisasian yang efektif dalam internal LPP. Karena dengan sistem pengorganisasian yang jelas dan benar, LPP bisa menetapkan tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, siapa melapor kepada siapa, dan dimana keputusan harus diambil.

Menurut hasil observasi sementara, diduga bahwa sistem pengorganisasian di LPP Dpw PKB Jawa Barat terdapat masalah yang cukup serius pada spesialisasi kerja dan departementalisasinya. Spesialisasi kerja dan departementalisasi divisional di LPP DPW PKB Jawa Barat, hanya membuat konsistensi kebijaksanaan antar divisi dan setiap divisi bekerja secara monoton. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengorganisasian Basis Konstituen PKB Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Legislatif 2014”** agar tingkat partisipasi warga Nahdiyin pada setiap pemilu semakin meningkat. Disamping itu, penelitian ini bisa menambah khasanah kajian Manajemen Dakwah yang dengan lembaga politik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan bahwa inti permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah fungsi pengorganisasian dalam tim LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu ) Dpw PKB Jawa Barat.

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dan analisis, pokok permasalahan itu dirinci dalam dua permasalahan penelitian:

1. Bagaimana spesialisasi pekerjaan LPP Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi basis konstituen PKB pada pemilu legislatif 2014
2. Bagaimana departementalisasi LPP Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi basis konstituen PKB pada pemilu legislatif 2014
3. Bagaimana dukungan real basis NU terhadap PKB pada pemilu legislatif 2014

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui spesialisasi kerja di internal LPP Dpw PKB Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi basis konstituen PKB pada pemilu legislatif 2014
- b. Untuk mengetahui departementalisasi di internal LPP PKB Dpw PKB Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi basis konstituen PKB pada pemilu legislatif 2014
- c. Untuk mengetahui dukungan real basis NU terhadap PKB pada pemilu legislatif 2014

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

### a. Secara Teoritis

Diharapkan menjadi perangsang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan ilmu manajemen khususnya manajemen organisasi politik Islam, dan menjadi sumbangan pemikiran dan bahan diskusi serta acuan dalam pengembangan ilmu manajemen organisasi politik Islam.

### b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai organisasi politik atau partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa, serta memberikan pengetahuan dan motivasi kepada seluruh umat muslim yang berminat dibidang ilmu manajemen organisasi politik Islam.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Drs. H. Malayu Sihabuan Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan,

menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>5</sup>

Berbeda dengan Drs. H. Malayu Sihabuan, menurut George R. Terry: organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.

Artinya: Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.<sup>6</sup>

Sejalan dengan definisi pengorganisasiannya George R. Terry, Joan Gratto Liebler mengatakan, Organizing: the design of pattern of roles and relationships that contribute to the goal, roles are assigned, authority and responsibility are determined, and provision is made for coordination. Organizing typically involves the development of the organization chart, job descriptions, and statements of workflow. (Pengorganisasian: desain bentuk tugas yang membantu menghubungkan antara tujuan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai syarat untuk membentuk koordinasi. Pengembangan tipe-tipe organisasi ke dalam bagan organisasi, deskripsi pekerjaan, dan mempertegas alur pekerjaan.)<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pengorganisasian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian merupakan proses penyusunan kerangka

---

<sup>5</sup> H. Malayu dan Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 118-119.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>7</sup> Dewi K. Soedarsono, *Sistem Manajemen Komunikasi Teori, Model, Dan Aplikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 15.

pelaksanaan melalui penentuan, pembagian serta pendelegasian tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Berangkat dari definisi pengorganisasian diatas, Maka dapat kita ketahui bahwa pengorganisasian memiliki komponen-komponen yang membentuknya. Menurut George R. Terry ada empat komponen-komponen pengorganisasian yang berwujud dan dapat diingat dengan kata WERE (Pekerjaan, pegawai, hubungan kerja dan lingkungan). Marilah kita teliti lebih lanjut.<sup>8</sup>

#### 1. Pekerjaan.

Fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut dipisah-pisahkan kedalam sub-sub fungsi dan selanjutnya ke dalam sub-sub fungsi. Hal tersebut dilakukan karena :

- a. Distribusi pekerjaan kepada kelompok yang kemudian dibagikan lagi dan,
- b. Spesialisasi pekerjaan ke dalam bagian-bagian tugas yang kecil.

Dari berbagai fungsi tersebut, dibentuk pekerjaan kecil yang sejenis atas dasar persamaan pekerjaan atau efisiensi dapat apabila dijadikan bagian-bagian kecil, maka pelaksanaannya akan lebih mudah. Bagian-bagian tersebut disebut “Unit-unit kerja organisasi”.

#### 2. Pegawai.

Setiap orang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Lebih baik lagi apabila penugasan tersebut disertai perhatian terhadap kepentingan pegawai., setiap pengalaman dan keterampilan. Perhatian tersebut sangat diperlukan dalam pengorganisasian. Penugasan yang diberikan kepada masing-masing individu biasanya merupakan bagian tugas-tugas organisasi atau dapat juga berupa seluruh tugas dari suatu unit kerja. Pembagian tugas tersebut menghasilkan “unit kerja pegawai”.

---

<sup>8</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h. 77-78.

### 3. Hubungan kerja.

Hubungan kerja merupakan masalah penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal peka. Mencari keserasian dan kesatuan usaha hanyalah mungkin apabila hubungan tersebut cukup terbina dan baik. Sebagian besar problema di dalam pengorganisasian berkaitan dengan kesulitan hubungan.

### 4. Lingkungan

Komponen terakhir dari pengorganisasian mencakup sarana-sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana pegawai-pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, perabot kantor, blanco-blanco, penerangan, dan sikap mental merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

Jika lebih diperinci maka komponen-komponen pengorganisasian menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian,<sup>9</sup> yaitu :

#### 1. Efektivitas dan Efisiensi

Peter Drucker seorang penulis bidang manajemen yang terkemuka, menjelaskan bahwa efisiensi berarti mengerjakan sesuatu secara benar (doing thing right), sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right thing).<sup>10</sup>

#### 2. Produktivitas

Dalam model "input-transformasi dan output" peningkatan efisiensi amat erat kaitannya dengan produktivitas. Karena suatu organisasi bukan hanya harus menghindari pemborosan akan tetapi harus melakukan optimalisasi baik dalam bentuk barang maupun jasa.

#### 3. Departementalisasi

---

<sup>9</sup> Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan & perilaku Administrasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1986), h.94.

<sup>10</sup> Dewi K. Soedarsono, *Op. cit.*, h. 23.

Pesatnya teknologi dan semakin kompleksnya masalah organisasi modern menuntut adanya spesialisasi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Berbagai jenis spesialisasi itulah yang memang mengharuskan adanya departementisasi. Departementalisasi adalah membagi aktivitas kepada sub (unit) yang lebih kecil serta mempunyai tanggung jawab mandiri dalam bidangnya. Proses ini akan menciptakan spesialisasi serta akan menciptakan kerja sama yang terpadu antar bagian yang satu dengan yang lainnya. Di bawah ini akan diuraikan tentang struktur organisasi formal yang banyak dipakai dalam berbagai organisasi bisnis ataupun non bisnis dan dari yang sangat sederhana sampai paling rumit .

a. Organisasi lini

Organisasi Lini ini diciptakan oleh Henry Fayol dan biasanya organisasi ini dipakai perusahaan-perusahaan kecil saja.<sup>11</sup> Di dalam organisasi lini, terdapat garis komando langsung dari pimpinan puncak ke bawahan terendah sampai kepada pimpinan puncak. Setiap karyawan bisnis berada dalam posisi garis komando yang dimulai dari pimpinan puncak sampai pada atasan satu tingkat di atasnya. Setiap tingkat manajemen memperoleh perintah secara langsung dari pimpinan di atasnya dan jalur perintah akan mengalir dari atasan kepada bawahan tanpa ada loncatan.<sup>12</sup>

b. Organisasi Lini dan staf

Organisasi lini dan staf menghilangkan berbagai kelemahan yang melekat pada organisasi lini. Pada organisasi Lini, asas kesatuan komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertical dari pucuk pimpinan kepada pimpinan dibawahnya. Pucuk pimpinan tetap sepenuhnya berhak menetapkan keputusan, kebijaksanaan, dan merealisasikan tujuan perusahaan. Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, ia mendapat

---

<sup>11</sup> H. Malayu dan Hasibuan, *op. cit.*, h. 150.

<sup>12</sup> Drs. H. Kusnadi, HMA, MSI, Drs. Marwan, Drs. H. Sumeidi Kadarisman, Drs. Soelaiman Sukmalana, MM, Cqm, Drs. H. Dadang Suherman, Msi, Pengantar Manajemen, (Bandung: Unibraw Malang, 2009), h. 226-227.

bantuan dari para staf. Para ahli yang berada didalam organisasi bisnis tidak memiliki wewenang untuk memerintah akan tetapi para ahli ini hanya membantu memberikan nasehat yang diperlukan oleh para pegawai pelaksana.<sup>13</sup>

Teori organisasi modern sering membedakan staf ahli kedalam tiga kelompok, yaitu<sup>14</sup> : 1. Staf ahli pemberi nasehat, 2. Staf ahli pelayanan dan 3. Staf ahli pengawasan.

- a) Staf ahli pemberi nasehat. Staf ahli ini hanya bertanggung jawab untuk memberikan nasehat yang diperlukan oleh para pimpinan menengah keatas.
- b) Staf ahli pelayanan. Staf ahli yang melakukan pekerjaan khusus (spesifik) di segala bidang (departemen) organisasi bisnis. Misal, staf ahli computer menangani masalah pengolahan data.
- c) Staf ahli pengawasan. Didalam organisasi bisnis, karena pekerjaan yang dilakukan harus betul-betul sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka setiap pekerjaan harus diawasi secara ketat dan seksama jangan sampai menyimpang. Setiap aspek yang dikerjakan didalam organisasi bisnis akan diawasi secara seksama dan ketat karena penyimpangan dari rencana akan menyebabkan sasaran dan tujuan bisnis yang semula dapat diterima dalam kenyataannya menimbulkan kerugian sehingga dalam analisis diterima dalam kenyataannya adalah gagal.

### c. Organisasi Fungsi

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 228.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.229.

Didalam organisasi fungsi, wewenang dan tanggung jawab melekat terhadap proses atau fungsi di seluruh departemen organisasi bisnis. Dengan demikian, para manajer fungsi bertanggung jawab mengawasi bawahannya sesuai dengan fungsinya. Setiap anggota fungsi tidak dapat dibenarkan untuk mengerjakan fungsi lainnya sebab wewenang dan tanggung jawab setiap fungsi dengan sangat tegas telah digariskan.<sup>15</sup>

#### d. Organisasi Matrik

Bentuk pengorganisasian ini merupakan perluasan serta pengejawantahan dari struktur organisasi Lini dan Staf. Organisasi ini biasa disebut dengan organisasi manajemen proyek, yaitu struktur pengorganisasian yang spesialisasi antarbagiannya dipadukan untuk melaksanakan aktivitas tertentu.<sup>16</sup>

#### e. Organisasi Komite

Didalam organisasi komite , kelompok formal menggantikan para manajer individual pada satu posisi atau lebih di dalam struktur organisasi bisnis. Wewenang dan tanggung jawab terletak pada kelompok yang merupakan anggota komite yang biasanya dipilih dari berbagai tingkatan manajemen. Semua keputusan atau rekomendasi bisnis dipelajari dan dievaluasi terlebih dahulu oleh anggota komite.

#### f. Organisasi Geografis

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 231.

<sup>16</sup> M. Munir, S.Ag, M.A, Wahyu ILhahi, S.Ag, M.A, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Group, 2009), h. 124.

Penyusunan struktur organisasi berdasarkan daerah ini adalah untuk dapatnya mengakomodasi berbagai perbedaan kebutuhan di setiap daerah sehingga akan memudahkan melakukan pengawasan berdasarkan daerah meskipun pengawasan tipe lainnya masih tetap diperlukan akan tetapi yang dianggap mendesak adalah dari sudut geografis.<sup>17</sup>

#### g. Organisasi Divisi

Struktur divisi lazim dinamakan pula struktur produk atau dikenal sebagai bentuk pemilahan kedalam unit-unit strategis. Dengan penstrukturan seperti ini didirikanlah divisi-divisi bagi produk-produk individual, proyek-proyek berskala besar, serta program-program maupun aktivitas-aktivitas tertentu. Namun masih terbuka kemungkinan adanya alternative lain dari struktur divisi ini, seperti berdasarkan lokasi geografis, kelompok-kelompok sasaran, para langganan, ataupun saluran distribusinya.<sup>18</sup>

#### h. Fungsionalisasi

Fungsionalisasi pada hakikatnya bagaimana pun kompleksnya organisasi, bagaimanapun struktur organisasi disusun, dan bagaimanapun cara yang dilakukan untuk pembagian tugas, selalu ada satuan kerja yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan tertentu dan juga atas terpecahkannya masalah-masalah tertentu yang mungkin dihadapi organisasi.<sup>19</sup>

### 5. Rantai Komando

---

<sup>17</sup> Drs. H. Kusnadi, HMA, MSI, Drs. Marwan, Drs. H. Sumeidi Kadarisman, Drs. Soelaiman Sukmalana, MM, Cqm, Drs. H. Dadang Suherman, Msi, *op. cit.*, h. 228.

<sup>18</sup> Aime Heene, Dr. Sebastian Desmidt, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 218.

<sup>19</sup> Sondang P. Siagian, *op. cit.*, h. 95

Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah.<sup>20</sup>Teori ini mempunyai implikasi berperilaku yang amat penting. Implikasi itu ialah bahwa apabila wewenang lebih besar daripada tanggung jawab kecenderungan untuk seseorang bertindak otoriter menjadi semakin besar. Sebaliknya, apabila tanggung jawab tidak diimbangi dengan wewenang, tidak usah mengherankan apabila pemegang tanggung jawab itu sering ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya.

#### 6. Pembagian Tugas/Spesialisasi Kerja

Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pemerataan. Artinya, adalah ideal sekali apabila tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satuan-satuan kerja di dalam organisasi dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas daripada semua satuan kerja merata.<sup>21</sup>

#### 7. Dokumentasi dan Arsip Tertulis

Sistem dokumentasi dan kearsipan yang rapi akan sangat bermanfaat dalam hal:

- a. Tersedianya informasi yang diperlukan, baik untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya intelektual dan konseptual maupun bagi kegiatan-kegiatan operasional.
- b. Penelusuran kembali sejarah organisasi terutama dalam kaitan menarik pelajaran dari pengalaman, baik yang sifatnya positif maupun negative.
- c. Menjamin kesinambungan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang lalu tidak tergantung pada selera dan gaya kepemimpinan seseorang pada suatu periode tertentu.
- d. Memperlancar jalannya roda organisasi.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 126.

<sup>21</sup> Sondang P. Siagian, *op. cit.*, h. 96.

- e. Memenuhi persyaratan-persyaratan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8. Tata Cara dan Hubungan Kerja

Tata cara dan hubungan kerja berperan selaku “peraturan permainan” bagi setiap anggota organisasi.<sup>22</sup> Apabila diperinci lebih lanjut, akan terlihat cakupan yang amat luas, seperti:

- 1) Pengaturan tentang jam kerja,
- 2) Tata karma berhubungan dengan rekan setingkat, dengan para bawahan dan atasan,
- 3) Tata kesopanan dalam menghadapi pihak luar yang berhubungan dengan organisasi,
- 4) Disiplin kerja dengan segala seginya,
- 5) Tata cara pelaporan, termasuk gaya bahasa yang dipergunakan,
- 6) Dan hal-hal lain yang sifatnya normatif, baik ditinjau dari segi administrasi maupun dilihat dari sudut pandangan nilai-nilai sosial.

## 9. Koordinasi

Syarat terjadinya koordinasi ialah adanya tujuan dan wewenang bagi setiap anggota perusahaan yang dirumuskan secara jelas, disiplin, saling memberikan informasi, dan saling membantu.<sup>23</sup>

Dari Komponen-komponen pengorganisasian yang di paparan diatas, maka kemudian dapat kita fahami bahwa pengorganisasian berfungsi memerinci pekerjaan kedalam komponen-komponen aktivitas pekerjaan yang terkait dan otoritas hubungan atau posisi pelaksana kegiatan ke dalam struktur organisasi.<sup>24</sup> Dengan demikian, fungsi pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dibutuhkan dalam organisasi, agar roda organisasi berjalan secara efektif

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>23</sup> Dewi K. Soedarsono, *op. cit.*, h. 19.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 16.

dan efisien. Karena dengan pengorganisasian yang ilmiah dan objektif, kegiatan dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Namun sebelum memaparkan kaitan antara pengorganisasian dengan partai politik, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai pengertian partai politik menurut para ahli. Adapun pengertian-pengertian partai politik menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip dari Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil dan materiil.<sup>25</sup>

Menurut R.H. Soltau sebagaimana dikutip dari Miriam Budiarjo mendefinisikan bahwa partai politik sebagai berikut:

*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*

(Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 404.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 404.

Menurut Miriam Budiarmo dalam buku Sistem Politik Indonesia mengemukakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>27</sup>

Sigmund Neuman dalam karangannya Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut:

*A political party is the articulate organization of society's active political agents those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views.*<sup>28</sup>

(Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

Dengan mengetahui pengertian partai politik menurut para ahli di atas, maka partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Partai Politik

- a. Partai sebagai komunikasi politik

Yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang.

- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

---

<sup>27</sup> A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 102.

<sup>28</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 405.

Yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader dan kursus penataran.

c. Partai politik sebagai sarana recruitment politik yaitu parpol

Berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Yaitu partai politik berusaha mengatasi suasana persaingan dan perbedaan pendapat di masyarakat.<sup>29</sup>

Dengan demikian sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.<sup>30</sup> Atau dengan kata lain, partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern.

Jika kegiatan partai politik dikaitkan dengan proses pengorganisasian, maka pengorganisasian merupakan proses penyusunan kerangka kerja dari suatu partai politik dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan basis konstituennya pada pemilihan umum. Apabila proses pengorganisasian yang dilakukan partai politik ilmiah, objektif dan tepat, maka kerja-kerja politiknya pun akan efektif dan efisien. Apabila tidak demikian, maka kerja-kerja politik yang dilakukan partai politik akan jauh dari sasaran yang sudah ditetapkan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 405-406.

<sup>30</sup> Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996), h. 11.

Dari paparan diatas mengenai pengorganisasian dan partai politik, maka dapat kita turunkan menjadi beberapa poin dalam perspektif manajemen, yaitu:

1. Organisasi politik adalah gerakan merebut kekuasaan Negara, sifatnya perebutan kekuasaan.
2. Organisasi politik alatnya modern, kebutuhan hidupnya kompleks, dan harus diupayakan dan diperjuangkan. Oleh sebab itu organisasinya formal, dipimpin oleh kelompok orang yang progresif revolusioner atau demokratis.
3. Pimpinan harus orang yang paling memahami demokrasi atau revolusi dan yang paling banyak pengalamannya dan pengetahuannya.
4. Organisasi politik memenuhi kebutuhan hidupnya secara interdependensi, mereka bekerja untuk mengubah system politik, ekonomi, dan budaya, oleh sebab itu organisasi yang demikian sifatnya kritis, progresif dan revolusioner.
5. Input organisasi adalah bahan bakunya massa dan anggota partai politik, tenaga kerja yaitu kelompok orang yang paling progresif revolusioner atau demokratis, alat kerjanya pemilihan umum atau revolusi, informasi dari lingkungan masyarakat, metode kerjanya terus menerus melakukan aksi, modalnya kekuatan massa, dan kepemimpinan yaitu anggota partai yang paling berani dan memiliki keterampilan dan pengetahuan aksi.
6. Outputnya adalah kekuasaan Negara.
7. Output ditransformasikan kepada seluruh rakyat untuk mengubah system ekonomi dan budaya.
8. Pemimpin politik mendorong dan mengarahkan anggota dan massanya untuk bekerja efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu kekuasaan Negara. Karena efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan, maka diulang terus menerus sehingga menjadi

kebiasaaan hidup dalam demokrasi atau revolusi yang kemudian membentuk karakter rakyat yang tunduk dan patuh kepada pimpinan dan organisasinya.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan efisien maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis pula. Adapun langkah-langkah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



## **1. Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Jl. Soekarno Hatta No. 580 Bandung. Alasan diadakan penelitian di lokasi tersebut antara lain:

- a. Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Karena di lokasi tersebut dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan pada saat penelitian.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian dengan memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya, kemudian melakukan representasi obyektif dengan mendeskripsikan gejala-gejala data atau fakta sebagai adanya representasi data dengan diiringi pengolahan agar dapat diberikan penafsiran.<sup>31</sup>

## **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah hasil penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun data-data yang dibahas yaitu tentang masalah:

- a. Data tentang spesialisasi kerja di internal LPP Dpw PKB Jawa Barat
- b. Data tentang departementalisasi di internal LPP Dpw PKB Jawa Barat

## **4. Sumber Data**

---

<sup>31</sup> Hadiri, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1999), h. 74.

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, ialah sumber yang dijadikan objek penelitian yaitu (informan) antara lain :
  - 1) Sekretaris Umum DPW PKB Provinsi Jawa Barat
  - 2) LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPW PKB Provinsi Jawa Barat
  - 3) Masyarakat sekitar DPW PKB Provinsi Jawa Barat
- b. Sumber data sekunder, ialah sumber lain yang membantu atau pelengkap dari sumber primer yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian ini, yaitu antara lain :
  - 1) Buku-buku yang terkait dengan pengorganisasian dan partai politik
  - 2) Data- data berupa arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan pengorganisasian dan partai politik

## **5. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data.<sup>32</sup> Untuk membantu pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya yaitu:

- a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup> Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)., h. 134.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research : Jilid 2* ( Yogyakarta : Andy Offset, 1986)., h. 134.

Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui mekanisme penerapan dan efektifitas fungsi pengorganisasian di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat

b. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan responden.<sup>34</sup> Metode ini dilakukan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan pertanyaan kepada informan sudah dipersiapkan tetapi cara penyampaiannya dilangsungkan secara bebas dan terikat oleh pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum dalam melakukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan dokumen sebagai sumber data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang ada kaitanya dengan masalah yang hendak diteliti dengan cara melihat dan mengamati langsung.<sup>35</sup>

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi umum daerah penelitian dan data-data yang masih ada kaitannya dengan pengorganisasian dan partai politik.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif analitik yaitu metode yang digunakan di dalam suatu penelitian dengan cara mengumpulkan,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 95.

menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG